

# Prabowo Sebut Kerugian di Perikanan,

Susi Pudjiastuti: Itu Dulu

Reporter: **Fajar Pebrianto**

Editor: **Kodrat Setiawan**

Selasa, 26 Juni 2018 11:16 WIB



*Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat konferensi pers mengenai cantrang di kantor KKP, Jakarta, 18 Januari 2018. TEMPO/Naufal Dwihimawan Adjiditho*

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan [Susi Pudjiastuti](#) menanggapi pidato Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut nama Susi saat menyoal kerugian negara di sektor kelautan.

"Ya bukan Pak Prabowo saja, World Bank juga bilang begitu (kerugian negara di sektor kelautan). Tapi itu dulu," kata Susi saat ditemui selepas acara open house di rumah dinas di Jalan Widya Chandra V, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 25 Juni 2018.

Baca juga: [Prabowo Sebut Ekonomi RI dalam Bahaya karena Utang](#)

Saat pidato di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan Senin kemarin, Prabowo mengkritik pemerintah tentang berbagai hal mulai dari soal utang hingga indeks pembangunan manusia. Prabowo menyebut total utang Indonesia jika digabung utang pemerintah, BUMN, dan swasta mencapai Rp 9.000 triliun meski utang pemerintah hanya sekitar Rp 4.000 triliun.

"Ibu Susi malah, katakan lebih dari saya. Beliau katakan Rp 2.000 triliun hanya di sektor perikanan. Saya kira beliau juga enggak punya gelar ekonomi, tapi beliau mengerti masalah," kata Prabowo.

Simak: [Berantas Ilegal Fishing, Susi Pudjiastuti Tuai Pujian di Roma](#)

Namun, kata Susi, kondisi sekarang sudah berbeda. Susi mengklaim perdagangan di sektor perikanan sepanjang kuartal pertama 2018 telah mencatatkan pencapaian yang positif. Menurut dia, capaian ini diperoleh karena menurunnya tren illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal dalam beberapa tahun terakhir. "Kuartal pertama Indonesia sudah surplus sekitar US\$ 1 miliar," kata Susi.

Berkurangnya illegal fishing, kata dia, telah membuat stok ikan bertambah dan otomatis mengkerek produksi dan penjualan nelayan. Meski mencatatkan hasil perdagangannya yang positif, Susi tetap gencar menggenjot sektor perikanan Indonesia.

Lihat: [Susi Pudjiastuti Ajak Norwegia Berantas Kejahatan Perikanan](#)

Akhir Mei 2018, [Susi Pudjiastuti](#) bertemu Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Tokyo, Jepang. Dalam pertemuan itu, Susi berharap Indonesia diberikan pembebasan fasilitas bea masuk produk perikanan sebagaimana yang telah diberikan Jepang kepada Thailand dan Vietnam. Menurut dia, rata-rata bea masuk 7 persen selama ini telah membuat produk perikanan Indonesia sulit bersaing di Negeri Sakura itu.

**Susi Pudjiastuti:**

## **Perdagangan Perikanan Kuartal I Surplus US\$ 1 M**

Reporter: **Fajar Pebrianto**

Editor: **Kodrat Setiawan**

Selasa, 26 Juni 2018 10:23 WIB



*Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. TEMPO/Fakhri Hermansyah*

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan [Susi Pudjiastuti](#) mengklaim perdagangan di sektor perikanan sepanjang kuartal pertama 2018 telah mencatatkan

pencapaian yang positif. Menurut dia, capaian ini diperoleh karena menurunnya tren illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal dalam beberapa tahun terakhir.

"Kuartal pertama Indonesia sudah surplus sekitar US\$ 1 miliar," kata Susi saat ditemui selepas acara open house di rumah dinas di Jalan Widya Chandra V, Senayan, Jakarta Selatan, Senin malam, 25 Juni 2018. Berkurangnya illegal fishing, kata dia, telah membuat stok ikan bertambah dan otomatis mengerek produksi dan penjualan nelayan.

Baca: [Susi Pudjiastuti Ajak Norwegia Berantas Kejahatan Perikanan](#)

Susi mengatakan bukan hal mudah untuk mencapai nilai surplus US\$ 1 miliar ini. Laut Indonesia, kata dia, sempat menderita kerugian hingga Rp 2.000 triliun lebih saat illegal fishing masih marak terjadi.

Meski mencatatkan hasil perdagangannya yang positif, Susi tetap gencar menggenjot sektor perikanan Indonesia. Akhir Mei 2018, Susi bertemu Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Tokyo, Jepang. Dalam pertemuan itu, Susi berharap Indonesia diberikan fasilitas bea masuk produk perikanan sebagaimana yang telah diberikan Jepang kepada Thailand dan Vietnam. Menurut dia, rata-rata bea masuk 7 persen selama ini telah membuat produk perikanan Indonesia sulit bersaing di Negeri Sakura itu.

Simak: [Menteri Susi Kunjungi Norwegia, Ini Hasilnya](#)

Susi menjelaskan Indonesia pantas mendapatkan pembebasan tarif bea masuk ini mengingat Indonesia jauh lebih gencar dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dibandingkan Vietnam dan Thailand. Ia berpendapat, jika Indonesia dibebaskan tarif bea masuk, maka manfaat bukan hanya dapat dinikmati pengusaha perikanan Indonesia, tetapi juga pengusaha Jepang yang berinvestasi pada industri pengolahan hasil laut.

Pada 19 Juni 2018, Susi menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Oslo, Norwegia, yang membahas isu-isu kelautan seperti tata kelola laut bebas hingga ilegal fishing. Dalam pertemuan ini, Susi mengusulkan agar pertemuan tingkat tinggi ini bisa bekerja sama dengan Our Ocean Conference, sebuah pertemuan tahunan yang juga membahas isu yang sama. "OCC memiliki kelebihan dalam mengumpulkan komitmen untuk penyehatan lingkungan," kata Susi dalam keterangannya.

Lihat: [Berantas Ilegal Fishing, Susi Pudjiastuti Tuai Pujian di Roma](#)

Menurut [Susi Pudjiastuti](#), upaya penyelamatan laut bergerak linier dengan upaya pemerintah menggenjot bisnis sektor perikanan. Saat ini, kata dia, isu soal illegal fishing telah menjadi perhatian serius negara-negara di dunia sehingga Presiden Joko Widodo memintanya untuk menjadi leader atau pemimpin khusus dalam isu ini.